

Tribun Manado[®]

tribunmanado.co.id

SELASA
16 FEBRUARI 2016

Diplomasi Ekonomi Berbasis Maritim

Potensi Perikanan Sulut
DIPLOMASI ekonomi sebagai salah satu prioritas diplomasi Indonesia ditujukan untuk menopang kemandirian ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Prioritas tersebut sesuai dengan target Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor 300 persen dan peningkatan 20 juta wisatawan asing pada tahun 2019. Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Januari 2016 menyampaikan bahwa Indonesia telah mengeluarkan 8 paket reformasi ekonomi guna menjadikan ekonomi Indonesia kompetitif.

Selama tahun 2015, mesin diplomasi ekonomi Indonesia bekerja aktif mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015 juga terus memanfaatkan peluang pasar non-tradisional baik di Pasifik

Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia.

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mendorong berbagai upaya untuk menarik investasi asing di beberapa negara melalui prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan ketahanan pangan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka percepatan proses perizinan dan prosedur investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan "One Stop Services" serta penunjukan menteri-menteri penghubung untuk beberapa negara guna memastikan bahwa hambatan investasi dapat teratasi dengan baik.

Arah pembangunan ekonomi berbasis maritim telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan negara RI. Memperkuat perundangan yang ada, telah terbit JU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Perpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kenakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber

Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

Pengelolaan potensi sumber daya alam kelautan Indonesia

diharapkan dapat menopang perekonomian Indonesia. Pada bidang perikanan yang meliputi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan menghasilkan USD 47 miliar per tahun, pariwisata bahari sebesar USD 29 miliar per tahun dan bidang energi terbarukan sebesar USD 80 miliar per tahun yang terdiri dari energi arus laut, pasang surut, gelombang, biofuel alga dan panas laut Minyak bumi dan gas offshore senilai USD 68 miliar.

Keaneekaragaman hayati laut Indonesia, juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri bioteknologi bahan pangan, obat-obatan, kosmetika dan bioremediasi. Hasil seabed mineral mencapai USD 256 miliar per tahun, sementara dari sektor transportasi laut ada potensi USD 90 miliar per tahun.

Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan Minahasa Potensi maritim Sulawesi Utara telah menjadi perhatian baik pemerintah maupun stakeholders lainnya. Pengembangan kawasan andalan Manado-Bitung ditujukan untuk peningkatan penangkapan ikan dan industri pengelolaan ikan.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung-Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan lancar yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya petani dan nelayan guna meningkatkan taraf hidupnya.

Salah satu produk ekspor dari Provinsi Sulut yang paling besar adalah produk ikan kaleng. Data menunjukkan 10 (sepuluh) komoditi utama ekspor Sulut yaitu: minyak kelapa kasar, minyak goreng sawit, minyak kaleng, bungkil kopra, ikan kayu, asam lemak dari sawit, tepung kelapa, ikan beku, dan biji pala, dengan negara tujuan ekspor yaitu Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, China, Jepang,

Belanda, Jerman, Malaysia, Inggris dan Arab Saudi. Dalam rangka peningkatan ekspor in-

dustri perikanan, terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung untuk memperluas manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Disamping kesinambungan pengembangan KEK Manado-Bitung terdapat beberapa kendala berupa kurangnya SDM mumpuni dalam mengelola PPS Bitung dalam konteks kemaritiman yang lebih luas. Dari segi kualitas hasil produksi pengalangan ikan di beberapa

negara tujuan ekspor tradisional seperti Jepang telah menaikkan standarisasinya yang mengakibatkan penurunan minat ekspor para nelayan dan pengusaha.

Kendala-kendala tersebut merupakan segelintir masalah yang memerlukan langkah serius pemerintah dalam mendesain blue print kemaritiman sesuai dengan kebijakan Maritim pemerintah saat ini. Konteks kemaritiman dengan cakupan yang lebih luas

diharapkan dapat menjadikan PPS Bitung sebagai pintu ke wilayah pasifik. Lebih jauh, penyiapan kapal-kapal penangkap ikan dengan kualitas dan kapasitas lebih besar dibutuhkan untuk mengembalikan bahkan melipatgandakan hasil tangkapan ikan pasca moratorium kapal eks asing. Penyiapan SDM yang ahli dalam bidang kemaritiman perlu disiapkan dengan mendirikan sekolah dan Perguruan Tinggi Kemaritiman.

Praktik penerapan kebijakan moratorium yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia juga menjadi salah satu perhatian nelayan.

Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan moratorium tersebut antara lain: peningkatan armada perikanan tangkap berteknologi tinggi, peningkatan kapasitas para nelayan dan pemetaan tujuan ekspor guna menghindari rendahnya posisi tawar.

Sinergi antar Stakeholders

Potensi sumber daya kelautan dan dukungan pemerintah melalui strategi pembangunan kemaritiman khususnya pada daerah Pengembangan-Ekonomi Khusus berbasis Maritim perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku

kepentingan. Adanya kebutuhan akan teknologi pengelolaan sumber daya dan jasa maritim, pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan iptek dan budaya maritim sebagai pendukung agenda pembangunan kelautan Indonesia akan menjadi agenda penting menuju ekonomi biru.

Kerja sama internasional dengan negara-negara sahabat khususnya yang telah memiliki kebijakan pembangunan kemaritiman seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, Jepang dan RRT akan menjadi agenda penting dalam misi pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pembangunan kemaritiman. Upaya kerja sama tersebut dapat sekaligus dilakukan dalam mencari peluang ekspor komoditas unggulan hasil kelautan Indonesia.

Guna koordinasi dalam peningkatan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri sebagai penjuror promosi Indonesia di luar negeri telah memperkuat infrastruktur dan membangun sistem seperti: 1) pembentukan unit diplomasi ekonomi yang diketuai langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri; 2) peluncuran website <http://dkp.kemlu.go.id> untuk tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan perdagangan negara lain; 3) peluncuran website <https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/> untuk fasilitasi promosi, interaksi dan penanganan langsung inquiries; 4) peluncuran kemitraan strategis dengan Gulf Cooperation Council (GCC); dan 5) pembuatan data peraturan perdagangan investasi dari 151 negara sebagai referensi untuk pemajuan kerja sama perdagangan investasi.

Salah satu tujuan pembangunan sistem dan memperkuat infrastruktur tersebut adalah untuk memastikan bahwa berbagai komitmen kerja sama ekonomi yang telah dicapai dapat ditindaklanjuti dan membawa hasil konkret serta membawa manfaat langsung bagi rakyat. (*)



Penulis:

Leonard F. Hutabarat, Ph.D.

● Pemerintah Masalah Internasional
● Alumnus Institut d'Etudes
Politiques (IEP) de Paris